



ARSIP  
KEUANGAN

WALIKOTA AMBON

PERATURAN WALIKOTA AMBON  
NOMOR- 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON  
TAHUN ANGGARAN 2015

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk kepentingan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan dasar kepada Masyarakat yang mempunyai asas manfaat tinggi dalam rangka pelayanan kepada masyarakat yang sifatnya mendesak sesuai Pasal 162 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 serta mengakselerasi penyelesaian pekerjaan yang belum selesai sampai dengan akhir tahun anggaran yang bersumber dari saldo tahun sebelumnya;
- b. bahwa sehubungan dengan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015 belum ditetapkan, maka untuk mendanai belanja dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Sebelum Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2015;
- Mengingat : 1. Undang -Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817);
3. Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

5. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kotamadya Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Hibah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;
20. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 13 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 13);
21. Peraturan Walikota Ambon Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 49);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERUBAHAN PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2015**

#### Pasal 1

Pengeluaran untuk belanja yang dimaksud dalam Peraturan Walikota ini adalah belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

#### Pasal 2

- (1) Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana pada pasal 1 merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun Anggaran yang berjalan seperti belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.
- (2) Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada pasal 1 adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat.
- (3) Program dan kegiatan yang dibiayai dari DBH-CHT, DBH-DR, DAK, Dana BOS, Dana Otonomi Khusus, Dana Darurat dan Dana transfer lainnya yang sudah jelas peruntukannya serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya yang belum cukup tersedia dan/atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan mendahului penetapan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

#### Pasal 3

- (1) Selain belanja sebagaimana disebut pada pasal 2 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) beberapa kegiatan yang sangat mendesak sesuai jadwal tidak dapat ditunda pelaksanaannya termasuk kegiatan tahun sebelumnya yang belum diakomodir dalam APBD tetapi secara fisik masih dalam pengerjaan.
- (2) Kegiatan – kegiatan disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang tidak dapat ditunda pelaksanaannya sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini tercantum pada Lampiran I Peraturan Walikota ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

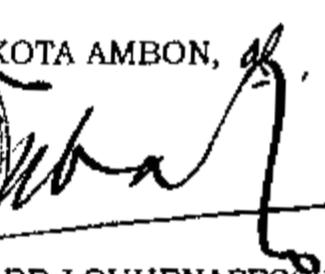
Belanja sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan pasal 3, dapat dilakukan dengan mempedomani Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang sudah melalui mekanisme pembahasan bersama dan dilakukan secara selektif.

Pasal 5

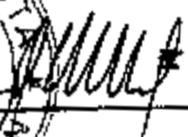
Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon  
pada tanggal 2 Pebruari 2015

WALIKOTA AMBON,  
  
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon  
pada tanggal 2 Pebruari 2015

SEKRETARIS KOTA AMBON,  
  
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2015 NOMOR 2

LAMPIRAN  
 NOMOR  
 TANGGAL  
 TENTANG

: PERATURAN WALIKOTA  
 : 2 TAHUN 2015  
 : 2 FEBRUARI 2015  
 : PERUBAHAN PENJABARAN APBD SEBELUM PENETAPAN PERUBAHAN APBD  
 : KOTA AMBON TAHUN 2015

	APBD AWAL	REVISI PERUBAHAN BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
KEC TELUK AMBON	Rp	Rp	Penambahan Belanja
INSENTIF RT/RW		928.800.000	928.800.000
	Rp	Rp	928.800.000
PPKD	Rp	Rp	Penambahan Belanja
Bantuan Sosial (Kedukaan)	1.875.000.000	4.375.000.000	2.500.000.000
	Rp	Rp	3.428.800.000
	1.875.000.000	5.303.800.000	3.428.800.000
	Rp	Rp	3.428.800.000
			<i>Jumlah Belanja Tidak Langsung</i>
DINAS PENDIDIKAN	Rp	Rp	Penambahan Belanja
Persediaan Alat Tulis Kantor	199.791.000	532.497.000	332.706.000
Persediaan Bahan Logistik Kantor	1.583.280.000	2.199.270.000	615.990.000
Lomba Debat Bahasa Indonesia		55.491.000	55.491.000
Lomba Debat bahasa Inggris/Asing		55.431.000	55.431.000
Olimpiade Sains		88.820.000	88.820.000
Olimpiade Olahraga Siswa Nasional		164.160.000	164.160.000
Cerdas Cermat 4 Pilar		68.808.000	68.808.000
	1.783.071.000	3.164.417.000	1.381.166.000
DINAS KESEHATAN	Rp	Rp	Penambahan Belanja
Pendampingan Tenaga Kesehatan	60.000.000	250.010.000	190.010.000
	Rp	Rp	190.010.000
DINAS PU	Rp	Rp	Penambahan Belanja
Peningkatan, Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali		227.476.000	227.476.000
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	14.017.852.805	14.638.484.365	620.631.560
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal, Mr. Saar Sopakua (Wainitu)		171.310.000	171.310.000
Pemeliharaan Berkala Jalan Aspal Tempat Parkir Pemerintah Kota Ambon		179.370.000	179.370.000
	14.017.852.805	15.216.640.365	1.198.787.560
DINAS TATA KOTA	Rp	Rp	Penambahan Belanja
Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan APEKSI	510.133.900	1.198.924.700	688.790.800
Pemb. Jalan Lingkungan dan Bangunan Pelengkap	7.121.447.000	7.380.341.000	158.894.000
Pembangunan Talud Penahan Tanah	2.681.182.000	3.097.485.000	406.303.000
Rehabilitas Sedang/Berat Gedung Kantor	2.211.346.235	2.342.027.730	130.681.495
Pematangan Lahan Relokasi Batu Gajah		15.000.000	15.000.000
Pembangunan Pasar Apung Mardika (Tahap I)		11.152.900	11.152.900
Pembangunan Pos Jaga Pasar Mardika		2.000.000	2.000.000
Pembangunan Pelataran Parkir Gedung D		10.000.000	10.000.000

	KEGIATAN	APROD AWAL	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH/BURUKAN	KETERANGAN
	- Penyediaan Prasarana dan Sarana Pemukiman	Rp 814.394.000	Rp 1.085.268.000	Rp 270.874.000	saldo 2014
	- Penyediaan Sarana dan Prasarana Persampahan	Rp	Rp 461.211.500	Rp 461.211.500	saldo 2014
	- Revitalisasi Pasar Apung Mardika (Tahap II)	Rp	Rp 875.972.700	Rp 875.972.700	saldo 2014
	- Pembangunan Gedung Kantor (Bantuan Propinsi)	Rp	Rp 1.130.000.000	Rp 1.130.000.000	Penambahan Belanja
	- Pembangunan Gedung Kantor	Rp 1.956.059.696	Rp 2.957.906.696	Rp 1.001.847.000	saldo 2014
		Rp 15.364.562.831	Rp 20.467.290.226	Rp 5.162.727.395	
	- Promosi Pembangunan Daerah	Rp	Rp 462.520.945	Rp 462.520.945	Penambahan Belanja
	- Survey Pengaruh pelaksanaan Kebijakan Pemerintah dalam Penguatan Kemiskinan di Kota Ambon	Rp	Rp 311.816.225	Rp 311.816.225	Penambahan Belanja
	- Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Peningkatan Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon Tahun 2015	Rp	Rp 356.891.445	Rp 356.891.445	Penambahan Belanja
	- Optimalisasi Sistem Aplikasi Perencanaan	Rp	Rp 349.995.510	Rp 349.995.510	Penambahan Belanja
		Rp	Rp 1.481.224.125	Rp 1.481.224.125	
	- Rehabilitasi Berat Gedung Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	Rp 2.100.000.000	Rp 2.100.000.000	Rp	Pergeseran Rincian Objek
	- Pembuatan Fasilitas Areal Perparkiran	Rp 765.959.000	Rp 765.959.000	Rp	Pergeseran Rincian Objek
	- Sewa Sarana Mobilitas Darat Kegiatan Apeksi	Rp 500.000.000	Rp 900.000.000	Rp	Pergeseran Rincian Objek
	- Pembangunan Terminal Petikemas	Rp 3.500.000.000	Rp 5.500.000.000	Rp 2.000.000.000	Penambahan Belanja
	- Rehabilitasi dan Pemeliharaan marka Jalan dan Rambu Lalu Lintas (UPR)	Rp 399.955.000	Rp 899.955.000	Rp 500.000.000	Penambahan Belanja
	- Pembangunan Halte Ojek	Rp	Rp 188.400.000	Rp 188.400.000	Penambahan Belanja
	- Pemertiban Terpadu TNI/POLRI dan PEMKOT	Rp 600.000.000	Rp 1.800.000.000	Rp 1.200.000.000	Penambahan Belanja
		Rp 8.265.914.000	Rp 12.154.314.000	Rp 3.888.400.000	
	- Pergadaan Taman kota	Rp	Rp 20.250.000	Rp 20.250.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Alat Berat	Rp	Rp 970.000.000	Rp 970.000.000	Penambahan Belanja
	- Rehab Bak Sampah	Rp	Rp 195.925.500	Rp 195.925.500	Penambahan Belanja
	- Pembuatan Taman Bunga	Rp	Rp 190.000.000	Rp 195.925.500	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Mesin Potong Rumpuk	Rp 21.000.000	Rp 52.500.000	Rp 31.500.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp 488.000.000	Rp 2.183.000.000	Rp 1.695.000.000	Penambahan Belanja
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp 8.142.995.000	Rp 10.428.375.000	Rp 2.285.380.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Peralatan Kebersihan	Rp 134.473.000	Rp 192.424.000	Rp 57.951.000	Penambahan Belanja
	- Peningkatan RTH	Rp 6.980.725.050	Rp 8.135.866.650	Rp 1.155.141.600	Penambahan Belanja
	- Kerja Extra Peningkatan Persampahan	Rp 89.640.000	Rp 175.440.000	Rp 85.800.000	Penambahan Belanja
	- Peningkatan Tempat Pemukiman Sampah	Rp 498.512.500	Rp 1.084.022.500	Rp 585.510.000	Penambahan Belanja
	- Penyediaan Tempat Pemukiman Sampah	Rp 122.500.000	Rp 547.500.000	Rp 425.000.000	Penambahan Belanja
		Rp 16.477.845.550	Rp 24.175.303.650	Rp 7.703.458.100	
	- Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura	Rp	Rp 102.859.500	Rp 102.859.500	Penambahan Belanja
	- Peningkatan Edukasi dan komunikasi Masyarakat di Badan Lingkungan Hidup (Sekolah Adiwiyata)	Rp	Rp 82.172.980	Rp 82.172.980	Penambahan Belanja
	- Penyusunan Pelaporan Status Lingkungan Hidup (SLDH) Kota Ambon	Rp	Rp 186.710.500	Rp 186.710.500	Penambahan Belanja
	- Koordinasi Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala Kota	Rp	Rp 197.397.000	Rp 197.397.000	Penambahan Belanja
	- Peningkatan Dampak Perubahan Iklim	Rp 100.000.000	Rp 252.310.200	Rp 152.310.200	Penambahan Belanja
	- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Perampahan-Bank Sampah (DAK)	Rp	Rp 47.026.000	Rp 47.026.000	Penambahan Belanja
		Rp	Rp	Rp	

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

KEGIATAN		APBD AWAL	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERURANG	KETERANGAN
	- Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Penampungan Sampah 4(Empak) Jenis	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	199.750.000	199.750.000	
		Rp	1.068.226.180	968.226.180	
KANTOR SAT POL PP	- Pengamanan Kegiatan APEKSI	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	280.612.500	280.612.500	
		Rp	280.612.500	280.612.500	
SEKRETARIAT KOTA	- Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan PMS	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	198.000.000	198.000.000	
	- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	368.340.000	220.010.000	
	- Penyediaan Makanan dan Minuman	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	4.026.000.000	1.026.600.000	
	- Rapat-Rapat koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	2.573.440.000	3.418.130.000	
	- Penyelenggaraan Pameran Hasil-Hasil Pembangunan dan Propaganda	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	2.499.988.950	750.000.000	
		Rp	11.833.898.950	5.612.740.000	
	- Sosialisasi Kambiyas/Forkopindo	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	299.138.000	245.197.790	
	- Peningkatan Keamanan Dalam Negeri	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	145.311.500	183.528.040	
BAGIAN TATA PEMERINTAHAN	- Rapat Koordinasi Revisi Perda No 03 dan 13 Tahun 2008	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	199.003.500	199.003.500	
	- Workshop Peningkatan Pelayanan Publik	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	1.456.528.120	630.200.000	
		Rp	3.158.906.950	1.257.929.330	
BAGIAN EKONOMI	- Rekrutas APEKSI Tahun 2015	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	99.400.000	99.400.000	
		Rp	99.400.000	99.400.000	
BAGIAN HUMAS	- Kegiatan APEKSI	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	399.875.000	561.085.000	
		Rp	960.960.000	561.085.000	
		Rp	960.960.000	561.085.000	
	- Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	4.079.972.000	1.524.284.250	
	- Kunjungan Kerja/Inpeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	487.400.000	459.400.000	
	- Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung kantor	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	910.844.100	685.805.000	
	- Pengadaan Perlengkapan Rumah jabatan /Dinas	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	722.965.062	235.540.000	
	- Pengadaan Peralatan Gedung kantor	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	322.006.031	80.900.000	
	- Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	385.834.062	369.555.000	
	- Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	543.999.860	260.500.000	
	- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	7.342.000.000	117.000.000	
	- Penyelenggaraan APEKSI	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	742.776.795	501.250.000	
		Rp	19.767.012.160	4.229.234.250	
		Rp	225.023.000.000	89.779.000	
	- Penyediaan Alat Tulis kantor	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	135.244.000	60.357.500	
	- Pengadaan Alat-Alat Kebersihan dan Pembersih Gedung kantor	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	25.000.000	131.308.000	
	- Pengadaan dan Pemasangan Aplikasi SIM Gaji	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	131.308.000	150.085.434	
	- Asistensi dan Pengkajian laporan Keuangan SKPD	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	150.085.434	358.780.563	
	- Asistensi dan Pendampingan Penyusunan laporan Keuangan	Rp	Rp	Rp	Saldo 2014
		Rp	358.780.563	196.950.000	
	- Pembuatan Sekat Ruang Kerja Kantor BPKK	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	95.522.489	249.987.750	
	- Fasilitas Percepatan Pelaksanaan Keuangan Daerah	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	249.987.750	50.000.000	
	- Training Pelatihan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	450.000.000	50.000.000	
	- Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Penyusunan APB Desa Bagi Aparatur Pemerintah Desa Kota Ambor.	Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	500.000.000	50.000.000	
BPKK		Rp	Rp	Rp	Penambahan Belanja
		Rp	500.000.000	50.000.000	

	KETERANGAN	LENGKAP AWAL	RENCANA PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG	KETERANGAN
	- Penyusunan Analisa Standar Belanja	Rp 75.517.250	Rp 175.517.250	Rp 100.000.000	Penambahan Belanja
	- Penyusunan Peraturan KDH Tentang Pergeseran Anggaran	-	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Penambahan Belanja
	- Orientasi dan Pengembangan Forum TAPD	-	Rp 200.000.000	Rp 200.000.000	Penambahan Belanja
	- Penyusunan Profil dan Pengembangan WEBSITE BPKK	-	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Penambahan Belanja
	- Penyempurnaan Sistem Informasi Penyusunan APBD	-	Rp 150.000.000	Rp 150.000.000	Penambahan Belanja
		Rp 685.761.250	Rp 2.818.531.986	Rp 2.132.770.736	
INSPEKTORAT KOTA	- Sosialisasi Pengawasan Laporan Keuangan	-	Rp 217.998.300	Rp 217.998.300	Penambahan Belanja
			Rp	Rp 217.998.300	
KANTOR PENGELOLAAN ASET	- Pengadaan Tanah Aset Pemerintah Kota Ambon		Rp 297.787.500	Rp 297.787.500	Penambahan Belanja
	- Kegiatan Manajemen Aset Pemerintah Kota Ambon		Rp 237.400.000	Rp 237.400.000	Penambahan Belanja
	- Kegiatan Penginputan Data Aset Pemerintah Kota Ambon		Rp 266.327.037	Rp 266.327.037	Penambahan Belanja
	- Kegiatan Bimbingan Teknis Pengelolaan aset Daerah		Rp 144.542.324	Rp 144.542.324	Penambahan Belanja
			Rp 946.056.861	Rp 946.056.861	
KPDE	- Rapat Kerja Apeksi Tahun 2015	Rp 9.000.000	Rp 49.467.000	Rp 40.467.000	Penambahan Belanja
		Rp 9.000.000	Rp 49.467.000	Rp 40.467.000	
DINAS PARAWISATA	- City Tour Peserta APEKSI		Rp 57.805.500	Rp 57.805.500	Penambahan Belanja
	- Parade Budaya Peserta APEKSI		Rp 116.690.300	Rp 116.690.300	Penambahan Belanja
	- launching Program Mangerte Ambon	Rp 65.000.000	Rp 578.270.820	Rp 513.270.820	Penambahan Belanja
		Rp 65.000.000	Rp 424.495.000	Rp 687.766.820	
BPPMD	- Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Tentang Desa	Rp	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	Penambahan Belanja
		Rp	Rp 75.000.000	Rp 75.000.000	
DIPERINDAG	- Pameran Apeksi Tahun 2015	Rp 101.613.250	Rp 168.894.750	Rp 67.281.500	Penambahan Belanja
	- Pasar Murah Bagi masyarakat Berpenghasilan Rendah	Rp	Rp 83.922.000	Rp 83.922.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Sarana Penunjang dan Urugan Tanah Pasar Terminal Transit Passo (Pasar I dan Pasar II)	Rp	Rp 159.270.000	Rp 159.270.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Komputer Gedung UPTD Metrologi	Rp	Rp 21.000.000	Rp 21.000.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Perhengkapan kantor Gedung UPTD Metrologi	Rp	Rp 22.250.000	Rp 22.250.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Meubelair Gedung UPTD Metrologi	Rp	Rp 29.480.000	Rp 29.480.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Etalase Bagi Penjual Ikan Asap	Rp	Rp 21.600.000	Rp 21.600.000	Penambahan Belanja
	- Monitoring, Pengawasan, dan Evaluasi Penzinan	Rp	Rp 19.951.300	Rp 19.951.300	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Tendu Pedagang	Rp 249.400.250	Rp	Rp (249.400.250)	Pergeseran Belanja
	- Pembangunan Kios Pedagang di Kecamatan Taluk Ambon	Rp	Rp 249.400.250	Rp 249.400.250	Pergeseran Belanja
		Rp 351.013.500	Rp 775.768.300	Rp 424.754.800	

KEGIATAN	RP/TA 2014		RP/TA 2015		KETERANGAN
	AWAL	AKHIR	AWAL	BERUBAH/BERUBANG	
BKKB	Pembangunan Balai Penyuluhan KB Tingkat Kecamatan (DAK)	Rp 350.000.000	Rp 425.000.000	Rp 75.000.000	Pergeseran Belanja
	- Pengadaan BKB KIT (DAK)	Rp 250.000.000	Rp 164.000.000	Rp (86.000.000)	Pergeseran Belanja
	- Pengadaan PLKB KIT (Dak)	Rp 150.000.000	Rp 164.062.500	Rp 14.062.500	Pergeseran Belanja
	- Pengadaan KIE KIT (DAK)	Rp -	Rp 134.968.636	Rp 134.968.636	Pergeseran Belanja
	- Pengadaan Mobil/Angkutan Alat Obat Kontrasepsi (DAK)	Rp 400.000.000	Rp 255.681.614	Rp (144.318.386)	Pergeseran Belanja
	- Pengadaan Kendaraan Angkutan Peserta KB (DAK 2014)	Rp -	Rp 475.200.000	Rp 475.200.000	Penambahan Belanja
	- Pengadaan Tanah Untuk Balai Penyuluhan KB	Rp 1.150.000.000	Rp 1.933.912.750	Rp 783.912.750	Penambahan Belanja
PERTANIAN	- Penyediaan Tumbuhan Pengganggu	Rp -	Rp 195.588.800	Rp 195.588.800	Penambahan Belanja
		Rp -	Rp 195.588.800	Rp 195.588.800	
Jumlah Belanja Langsung					
	Rp 84.229.810.416	Rp 123.515.096.103	Rp 39.285.285.687	Rp 39.285.285.687	
<b>JUMLAH RENCANA PERUBAHAN BELANJA</b>					
	Rp 86.104.810.416	Rp 128.818.896.103	Rp 42.708.085.687	Rp 42.708.085.687	

  
 WAKIL BUPATI AMBON  
 RICHARD LOUHENAPESY